

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi perhatian global, salah satunya melalui Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). SDGs Nomor 3, yaitu "Good Health and Well-being," bertujuan untuk memastikan kehidupan sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua usia. Tujuan ini mencakup berbagai aspek kesehatan, seperti pengurangan angka kematian ibu dan bayi, penanganan penyakit menular dan tidak menular, serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Keberhasilan pencapaian tujuan ini tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada keterlibatan berbagai pihak, termasuk organisasi kepemudaan dan lembaga sosial, yang memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kesehatan masyarakat melalui program-program yang berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan menjadi konsep utama dalam menghadapi tantangan global saat ini dan masa depan. Menurut *Brundtland Report* (1987), pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai “memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.” Hal ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, Jeffrey Sachs (2015) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan memerlukan kolaborasi multi-pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, karena kerumitan tantangan global tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang disepakati oleh 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015, menjadi panduan konkret dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dengan 17 tujuan yang mencakup pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, serta perlindungan lingkungan,

SDGs menekankan bahwa keterlibatan sektor swasta dalam implementasi program pembangunan berkelanjutan sangat krusial.

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi isu global yang mendesak seiring dengan meningkatnya tantangan di berbagai sektor, termasuk kesehatan yang menjadi perhatian utama dunia. Perubahan iklim, pencemaran lingkungan, dan urbanisasi yang tidak terkendali telah memperburuk kondisi kesehatan global, seperti meningkatnya penyakit pernapasan akibat polusi udara, penyebaran penyakit akibat perubahan suhu, serta krisis air bersih yang berdampak pada sanitasi dan kesehatan masyarakat. Selain itu, ketimpangan akses terhadap layanan kesehatan berkualitas masih menjadi masalah signifikan, terutama di negara berkembang, di mana fasilitas kesehatan dan tenaga medis masih terbatas. Data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan bahwa sekitar 2 miliar orang di dunia masih kekurangan akses air bersih dan sanitasi yang layak, yang berkontribusi pada tingginya angka kematian akibat penyakit yang sebenarnya dapat dicegah, seperti diare dan infeksi pernapasan. Sebagai respons terhadap tantangan ini, *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui Tujuan ke-3 menekankan pentingnya memastikan kehidupan sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua usia. Komitmen global ini menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi dan lingkungan, tetapi juga mencakup upaya peningkatan kualitas kesehatan sebagai fondasi penting untuk mencapai kesejahteraan jangka panjang bagi seluruh umat manusia. Melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR), perusahaan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian SDGs, seperti menciptakan inovasi berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan konsep di mana perusahaan memiliki kewajiban untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial dan pelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab mereka kepada para pemangku kepentingan. CSR bukan hanya tentang mencari

keuntungan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa aktivitas bisnis memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, terutama di sektor kesehatan. Permasalahan seperti tingginya angka stunting, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan berkualitas di daerah terpencil, serta beban penyakit menular dan tidak menular masih menjadi tantangan serius. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI tahun 2023, prevalensi stunting di Indonesia masih berada pada angka 21,6%, yang menunjukkan perlunya intervensi terpadu untuk memperbaiki gizi anak. Selain itu, akses terhadap fasilitas kesehatan yang memadai masih terbatas, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), yang menyebabkan ketimpangan layanan kesehatan di berbagai wilayah. Di sisi lain, meningkatnya polusi udara dan pencemaran lingkungan turut berkontribusi pada lonjakan kasus penyakit pernapasan dan penyakit kronis lainnya. Menyadari hal ini, pemerintah Indonesia telah memasukkan pembangunan kesehatan sebagai salah satu prioritas dalam *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025*, yang selaras dengan Tujuan ke-3 *Sustainable Development Goals (SDGs)*, yaitu memastikan kehidupan sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua usia. Upaya ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memperkuat sistem kesehatan nasional, mengurangi ketimpangan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan mencatat bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa dirinya mengidap penyakit tidak menular karena kurangnya pemeriksaan dini, minimnya edukasi tentang gejala, serta keterbatasan informasi yang mudah dipahami. Sebagian besar masyarakat baru menyadari kondisi kesehatannya setelah mengalami gejala yang sudah berat atau komplikasi (Dinkes Kalsel, 2022). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam komunikasi dan promosi kesehatan, terutama dalam menyampaikan pesan-pesan gaya hidup sehat kepada kelompok rentan.

Tantangan tersebut diperparah dengan masih terbatasnya kegiatan promotif dan preventif di lapangan, termasuk edukasi kesehatan untuk remaja perempuan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Masyarakat di daerah pinggiran sering kali hanya mendapatkan layanan kesehatan ketika ada kegiatan kunjungan dari program tertentu atau inisiatif berbasis komunitas. Oleh karena itu, intervensi dari luar sistem pelayanan kesehatan formal menjadi sangat penting untuk menjangkau kelompok yang belum terlayani dengan baik.

Di Indonesia, pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) memiliki dasar hukum yang kuat sebagai upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara tegas mengatur kewajiban CSR, khususnya bagi perusahaan yang bergerak di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam. Pasal 74 UU tersebut menyatakan bahwa perusahaan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bagian dari kontribusi mereka terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kewajiban ini diperkuat oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang mewajibkan investor untuk mematuhi prinsip tanggung jawab sosial. Di sisi lain, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas memberikan pedoman lebih rinci terkait implementasi CSR di perusahaan. Aturan-aturan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong perusahaan untuk tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnisnya. Dengan adanya landasan hukum tersebut, CSR menjadi kewajiban yang harus dijalankan oleh perusahaan, bukan sekadar pilihan, sehingga diharapkan mampu mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti peningkatan kesehatan masyarakat, perlindungan lingkungan, dan pengentasan kemiskinan.

Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang membuatnya kurang optimal. Minimnya pemahaman tentang konsep CSR, baik dari perusahaan maupun masyarakat,

sering kali menyebabkan program hanya dijalankan sebagai formalitas atau demi citra, bukan karena kesadaran akan dampak positifnya. Biaya pelaksanaan yang tinggi juga menjadi hambatan, terutama bagi usaha kecil dan menengah. Selain itu, lemahnya pengawasan membuat beberapa program CSR tidak memberikan dampak nyata. Menurut Kementerian Perindustrian, meskipun banyak perusahaan besar telah melaksanakan CSR, kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan masih terbatas akibat kurangnya koordinasi antar pihak dan ketidaksesuaian program dengan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, diperlukan upaya peningkatan pemahaman, efisiensi pelaksanaan, dan penguatan pengawasan agar CSR benar-benar memberi manfaat yang berkelanjutan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari portal resminya, Pemuda Bakti Banua memiliki visi untuk membangun kepemimpinan pemuda melalui peran dan dampak nyata bagi masyarakat Banua dan bangsa. Dengan semangat #innovatetoimpact, Pemuda Bakti Banua menekankan pentingnya inovasi dan kolaborasi dalam setiap aspek kehidupan pemuda, mulai dari kegiatan sosial, keagamaan, hingga pengembangan diri di berbagai bidang. Melalui program-program yang ada, pemuda di Banua diharapkan dapat mengambil peran aktif dalam memberikan solusi terhadap tantangan yang ada di sekitar mereka.

Sebagai bagian dari komitmennya, Pemuda Bakti Banua juga menyediakan berbagai ruang bagi pemuda untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Program-program yang diselenggarakan mencakup pendidikan, sosial, keagamaan, serta pembangunan desa, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemuda dalam berbagai aspek kehidupan.

Pemuda Bakti Banua menggerakkan program-programnya dengan melibatkan relawan yang memiliki semangat untuk berbagi dan berkolaborasi. Relawan ini memainkan peran penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan yang ada, serta dalam mengedukasi dan menyebarkan nilai-nilai positif kepada pemuda lainnya. Program relawan ini membuka kesempatan bagi pemuda untuk

berinteraksi dan belajar dari satu sama lain, memperkuat jaringan sosial mereka, dan memperluas wawasan mereka mengenai masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat.

Pemilihan Pemuda Bakti Banua sebagai objek penelitian dalam skripsi ini dilandasi oleh sejumlah alasan yang kuat, baik dari sisi kelembagaan maupun dari sisi kontribusi nyata terhadap masyarakat. Pemuda Bakti Banua merupakan lembaga kepemudaan yang berada di bawah naungan Yayasan Hasnur Centre dan dikenal aktif menginisiasi berbagai program sosial, keagamaan, kesehatan, dan pendidikan di wilayah Kalimantan Selatan. Lembaga ini memiliki visi yang jelas, yaitu membentuk generasi muda yang berjiwa kepemimpinan, peduli terhadap sesama, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi Banua. Salah satu kekuatan utama dari Pemuda Bakti Banua terletak pada basis relawan yang dimilikinya, yaitu lebih dari 100 relawan aktif yang tergabung dalam berbagai bidang pengabdian. Jumlah ini menunjukkan kapasitas organisasi dalam mengelola sumber daya manusia secara efektif serta membangun jaringan sosial yang kuat di tengah masyarakat, yang selaras dengan konsep social capital menurut Putnam (2000).

Program Muda Care dirancang sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi kesehatan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas medis. Program ini mencakup berbagai kegiatan, seperti penyuluhan kesehatan, pemeriksaan medis gratis, serta kampanye pola hidup sehat. Melalui program ini, Pemuda Bakti Banua berupaya mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan melakukan pencegahan terhadap berbagai penyakit. Selain itu, program ini juga memberikan kesempatan bagi tenaga medis dan relawan untuk berkontribusi langsung dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Strategi komunikasi memegang peran yang sangat penting untuk menjamin keberhasilan program tersebut. Komunikasi yang efektif dapat menjembatani informasi antara lembaga pelaksana dan masyarakat penerima

manfaat, sehingga tujuan program dapat dipahami, diterima, dan dijalankan bersama.

Seperti dikemukakan oleh Effendy (2003), komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan untuk memengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku. Dalam konteks CSR, pesan yang disampaikan perlu dirancang secara strategis agar mampu membangun kesadaran, menggerakkan partisipasi, serta menumbuhkan rasa kepemilikan dari masyarakat terhadap program sosial yang dijalankan.

Menyampaikan pesan-pesan sosial seperti isu kesehatan tidaklah mudah karena masyarakat memiliki latar belakang sosial, budaya, tingkat pendidikan, dan akses informasi yang berbeda-beda. Pesan kesehatan bisa saja tidak tersampaikan dengan baik karena kendala bahasa, media yang kurang tepat, atau bahkan ketidakpercayaan terhadap pihak yang menyampaikan. Menurut Cangara (2014), tantangan utama dalam komunikasi pembangunan adalah bagaimana menyampaikan pesan secara tepat kepada sasaran yang tepat dengan pendekatan yang sesuai dengan konteks lokal. Hal ini berlaku pula dalam komunikasi program kesehatan, yang membutuhkan pendekatan yang sensitif terhadap budaya dan kebiasaan masyarakat.

Wilayah Kalimantan Selatan masih menghadapi berbagai tantangan dalam sektor kesehatan masyarakat, khususnya dalam hal pengendalian penyakit tidak menular (PTM). Berdasarkan Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022, prevalensi penyakit seperti hipertensi, diabetes melitus, dan kolesterol tinggi terus meningkat setiap tahun. Tingginya angka PTM ini dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan rutin dan pola hidup sehat. Selain itu, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan di daerah terpencil, kurangnya edukasi yang berkelanjutan, serta masih minimnya kegiatan promotif dan preventif menyebabkan masyarakat sering kali baru menyadari kondisi kesehatannya setelah muncul komplikasi (Dinkes Kalsel, 2022).

Melihat kondisi tersebut, pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Nomor 3, yaitu “menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia”, menjadi sangat relevan untuk

diperkuat di daerah ini. Tantangan seperti rendahnya literasi kesehatan, distribusi layanan yang tidak merata, dan kurangnya program edukasi berbasis komunitas menunjukkan bahwa intervensi kesehatan di Kalimantan Selatan perlu diarahkan tidak hanya pada aspek kuratif, tetapi juga preventif dan promotif. Edukasi yang berkelanjutan serta deteksi dini penyakit menjadi langkah penting untuk menurunkan beban PTM dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah ini (Fauziah & Wardhani, 2022; Wulandari & Nurhasanah, 2021).

Program CSR Muda Health Care yang diinisiasi oleh Pemuda Bakti Banua menjadi menarik untuk diteliti. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Banua, khususnya generasi muda, akan pentingnya hidup sehat melalui edukasi kesehatan, pemeriksaan gratis, serta layanan sosial lainnya. Sebagai organisasi kepemudaan yang bergerak dalam bidang sosial dan pembangunan, Pemuda Bakti Banua menjalankan peran strategis dalam mendukung pencapaian SDGs Nomor 3 (*Good Health and Well-being*), terutama dalam aspek edukasi dan layanan kesehatan berbasis komunitas.

Keberhasilan program seperti Muda Health Care tentu tidak hanya bergantung pada kegiatan yang dilakukan, tetapi juga pada bagaimana pesan-pesan kesehatan tersebut disampaikan kepada masyarakat. Tantangan komunikasi muncul ketika organisasi harus menjangkau masyarakat luas yang memiliki tingkat literasi kesehatan yang beragam, serta ketika harus membangun kepercayaan terhadap layanan yang diberikan secara gratis dan sukarela. Jika komunikasi yang dilakukan tidak efektif, program dapat gagal menjangkau sasaran atau bahkan disalahpahami oleh masyarakat.

Pemahaman mendalam mengenai strategi komunikasi yang digunakan oleh Pemuda Bakti Banua dalam pelaksanaan program Muda Health Care menjadi sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pendekatan komunikasi apa yang digunakan, bagaimana mereka menyusun pesan dan memilih media, serta bagaimana strategi tersebut mampu menjangkau dan memengaruhi masyarakat sasaran. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi komunikasi program CSR, khususnya di bidang kesehatan dan pembangunan berkelanjutan berbasis pemuda.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi dalam mengeksplorasi bagaimana strategi komunikasi dapat menjadi faktor kunci dalam keberhasilan sebuah program CSR di bidang kesehatan. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan peluang dalam komunikasi program CSR, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung pencapaian SDGs Nomor 3, serta memperkuat peran organisasi kepemudaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana strategi komunikasi program CSR Pemuda Bakti Banua dalam mendukung Sustainable Development Goals nomor 3 (Studi Kasus Pada Program CSR Muda Care)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui strategi komunikasi program CSR Pemuda Bakti Banua dalam mendukung Sustainable Development Goals nomor 3 (Studi Kasus Pada Program CSR Muda Care)

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1.1 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan dalam kajian Corporate Social Responsibility (CSR) dan strategi komunikasinya dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDGs). Penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik terkait hubungan antara program CSR, dan kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan, terutama

dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi untuk studi-studi lanjutan dalam mengeksplorasi program CSR di berbagai sektor atau wilayah.

1.4.2 Manfaat Teoritis

1. Bagi Pemuda Bakti Banua (PBB): Penelitian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi dan memperbaiki program Muda Care, sehingga dampak program terhadap masyarakat lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan lokal.
2. Bagi pemerintah dan lembaga terkait: Menjadi masukan untuk menyelaraskan program CSR dengan kebijakan pembangunan kesehatan di daerah, khususnya dalam mendukung pencapaian SDGs.